

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah (ed), *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, Cetakan Ke-I*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- , *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana: Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010)
- Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta, Kompas, 2001)
- Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakri, 2001)
- Brian A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul :Thomson, 2004)
- Chaerudin et. al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2008)
- Dani Krisnawati et. al. dalam Eddy O. S. Hiariej (ed), *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Cetakan Ke-I*, (Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1989)
- Djoko Praskoro, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, (Jakarta: BinaAkskara, 1987)
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Yogyakarta, UNY Press, 2011)
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, (West Publishing , St. Paul, 1990)
- Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya laten Korupsi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- J.E Sahetapy, *Korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2013)
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Penerbit Bayumedia. 2006)

- Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar, Pustaka Refleksi, 2010)
- Kejaksaan Negeri Bandung, *Korupsi Yang Terkait Dengan Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan*, 2006
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Jakarta, Depdikbud, 2007)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta, KPK, 2006)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tanya Jawab Gratifikasi*, (Jakarta, KPK , 2010)
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung, Nusa Auliam, 2013)
- Kristian, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York, W.W Norton and Company, 1984)
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, (Bandung. Mandar Maju, 2001)
- Marwan Efendi, *Kejaksaan R.I, Posisi dan Fungsinya dalam Prespektif Hukum.:* (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1993)
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta, Pustaka Amani,, 2001)
- Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta, Laksbang Mediatama, 2008)
- PAF Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, (Bandung, Sinar Baru, 2004)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi I Cetakan 5*, (Jakarta: Kencana, 2005)

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Jakarta, Peradaban, 2007)
- Reda Manthovani, *Penyadapan vs. Privasi*, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2015)
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*, (Jakarta. UI Press, 1995)
- Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Rie , MS *Kaban Sangkal Suara Rekaman Sadapan Adalah Suaranya dalam Jabar* di unduh dari TribunNews.com, di unduh tanggal 2 Oktober 2016
- S. Wojowasito dan W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung, Penerbit Hasta, 2003)
- Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta, Buku Kompas, 1993)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cet III*, (Jakarta, UI Press. Jakarta. 1996)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2007).
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009)
- Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1990)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Balai Pustaka 2003)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen\

RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor No.17 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Jaksa Agung tentang Standar Operasional Prosedur Terintegrasi Dalam Penanganan Perkara di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor : PER-046/A/JA/12/2011

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan Terhadap Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Jurnal

Andi Rachmad, *Legalias Penyadapan Dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016

Maruarar Siahaan, *Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri dan Akuntabel Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Jurnal Ketatanegaraan Volume 004/September 2017

Muhammad Syafiq dan bichsan Muhajir, *Model Pengawasan Yang Efektif Terhadap Kinerja Kejaksaan Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Spektrum Hukum, ISSN: 2355-1550 (online),1858-0246

Nani Widya Sari, *Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017

Suharyo Suharyo, *Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Korupsi di Negara Demokrasi*, Jurnal Penelitian Hukum De Jurre, Vol 16, No 1 (2016)

Internet

Aco Hasanudin, *PKS Heran Vonis Luthfi Hasan Lebih Berat Dibandingkan Nazaruddin*, diunduh dari <http://www.tribunnews.com/> diunduh 4 Oktober 2016.

Ansar M Adib, *Andi Mallarangeng Siap Terima Vonis*, diunduh dari <http://www.solopos.com/>, tanggal 4 Oktober 2016

KBBI online, diunduh dari <http://kbbi.web.id/sadap> tanggal 3 Januari 2021.

Wiranto: Penyadapan Tindakan Melanggar Hukum, tetapi Boleh untuk KPK, unduh dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/18/17444151/wiranto-penyadapan-tindakan-melanggar-hukum-tetapi-boleh-untuk-kpk> tanggal 15 Januari 2021

Yuli Sulistyawan, *Kasus Penyuaan Jaksa dan Mafia Peradilan* di unduh dari <http://Infoindonesiakita.com/> tanggal 2 Oktober 2016